

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|--|
| Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun | 1 | dokumen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 | Dokumen | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3) | 100 | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi | 5 | perusahaan | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 | Dokumen | 0 | BIDANG PPKL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 22 | Dokumen | 0 | BIDANG PPKL | 0 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 77 | % | 618.619.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | | |
| Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 70 | perusahaan | 618.619.500 | | 5 | 6 | 8 | 2 | 30 | 2 | 27 | | |
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | 20 | Dokumen | 536.000.000 | BIDANG PENAATAN | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | | |
| Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 15 | Orang | 5.350.000 | BIDANG PENAATAN | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 70 | Badan Usaha | 77.269.500 | BIDANG PENAATAN | 5 | 6 | 8 | 2 | 30 | 2 | 27 | | |
| PROGRAM PENGAKUIAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi | 86 | % | 300.000.000 | | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | | |
| Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah lokus MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui di Provinsi Jambi | 36 | lokus | 100.000.000 | | 9 | 0 | 9 | 29 | 9 | 0 | 9 | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 11 | Dokumen | 100.000.000 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----|------|----|------|-----|-----|------------|--|--|
| Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah pemberdayaan kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi | 36 | kelembagaan | 200.000.000 | | 9 | 0 | 9 | 29 | 9 | 0 | 9 | | |
| Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 36 | Dokumen | 200.000.000 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 5 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina | 70 | % | 210.000.000 | | 35 | 35,0 | 35 | 35,0 | 0 | 0,0 | 0 | | |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi | 4 | kali | 210.000.000 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 22 | dokumen | 210.000.000 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | | |
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat | 100 | orang | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN & BIDANG PPKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase usulan penghargaan LH untuk masyarakat yang difasilitasi | 100 | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan | 6 | kategori | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 6 | entitas | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN & BIDANG PPKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif | 100 | % | 167.380.500 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 0 | 3 | | |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan | 17 | kasus | 167.380.500 | | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | | |
| | Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan | 23 | kasus | | | 3 | 2 | 7 | | 0,5 | 0 | 0,5 | | |
| Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani | 17 | pengaduan | 78.740.500 | BIDANG PENAAATAN | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | | |
| Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | 11 | perkara | 88.640.000 | BIDANG PENAAATAN | 3 | 4 | 7 | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | | |
| Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | 20 | perkara | 0 | BIDANG PENAAATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | 17 | perkara | 0 | BIDANG PENAAATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 28% | % | 250.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | | |
| | Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 71% | % | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% | | |
| Penanganan Sampah di TPA/TPST Reoional | Jumlah pengurangan sampah secara regional | 205.866,67 | ton/tahun | 250.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.866,67 | | |
| | Jumlah penanganan sampah secara regional | 522.019,05 | ton/tahun | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.019,05 | | |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan | 13 | dokumen | 250.000.000 | BIDANG PPKL | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 | Paket | 72.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1000 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | Dokumen | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 | Laporan | 375.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 80 | 36 | 56 | 56 | 38 | 108 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3 | Dokumen | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | Dokumen | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 0 | unit | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 19 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 48 | laporan | 1.657.704.021 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 250 | Laporan | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | Laporan | 641.204.021 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 1.016.580.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 11 | unit | 54.000.000 | | 5,5 | 0 | 2,5 | 6,25 | 2,5 | 3,25 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 21 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 | Unit | 18.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 88 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 | Unit | 36.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jambi, Oktober 2024

a.n. **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI,
Sekretaris,**

Muhammad Arif, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730301 200212 1 003

